

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 tahun 2010

Tanggal :30 April 2010

DAFTAR BADAN PUBLIK

A. LEMBAGA EKSEKUTIF

Misalnya:

1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009)

- a. Kementerian Koordinator
 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- b. Kementerian
 - Kementerian Sekretariat Negara
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Luar Negeri
 - Kementerian Pertahanan
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Kementerian Keuangan
 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Kementerian Perindustrian
 - Kementerian Perdagangan
 - Kementerian Pertanian
 - Kementerian Kehutanan
 - Kementerian Perhubungan
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Kementerian Pekerjaan Umum
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Pendidikan Nasional
 - Kementerian Sosial
 - Kementerian Agama
 - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
 - Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - Kementerian Riset dan Teknologi
 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - Kementerian Lingkungan Hidup
 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Perumahan Rakyat; dan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga

2. Pemerintahan Daerah

- a. Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi)
- b. DPRD Tingkat I (Provinsi)
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
- d. DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota)

3. Pemerintah Desa/Kelurahan

4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Misalnya:

- a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- b. Badan Intelijen Negara (BIN)
- c. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
- g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
- h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- l. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- n. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- o. Badan Pusat Statistik (BPS)
- p. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- r. Badan Urusan Logistik (BULOG)
- s. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
- b. Kepolisian Daerah
- c. Kepolisian Resort
- d. Kepolisian Sektor

6. Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Kejaksaan Agung
- b. Kejaksaan Tinggi
- c. Kejaksaan Negeri

B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

- 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI**
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat RI**
- 3. Dewan Perwakilan Daerah RI**

C. LEMBAGA YUDIKATIF

Misalnya:

1. Mahkamah Agung RI

- a. Peradilan Umum
 - Pengadilan Negeri
 - Pengadilan Tinggi
 - Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peradilan Agama
 - Pengadilan Agama
 - Pengadilan Tinggi Agama
- c. Peradilan Militer
 - Pengadilan Militer
 - Pengadilan Militer Tinggi
 - Pengadilan Militer Utama
 - Pengadilan Militer Pertempuran
- d. Peradilan Tata Usaha Negara
 - Pengadilan Tata Usaha Negara
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 - Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak.

2. Mahkamah Konstitusi RI

D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD

1. Komisi

Misalnya:

- a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004)
- b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007)
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39 Tahun 1999)
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999)
- e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002)
- f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002)
- g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002)
- h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008)
- i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000)
- j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002)
- k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2005)
- l. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005)

2. Dewan

Misalnya:

- a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999)
- b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003)
- c. Dewan Pembina Industri Strategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999)
- d. Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999)
- e. Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999)
- f. Dewan Maritim Indonesia (Keppres Nomor 161 Tahun 1999)
- g. Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999)
- h. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 1999)
- i. Dewan Gula Nasional (Keppres Nomor 23 Tahun 2003)
- j. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres Nomor 132 Tahun 2001)
- k. Dewan Pengembanagn Kawasan Timur Indonesia (Keppres Nomor 44 Tahun 2002)
- l. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Keppres Nomor 151 Tahun 2000)
- m. Dewan Pertahanan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2003)
- n. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Keppres Nomor 132 Tahun 1998)

3. Komite

Misalnya:

- a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 105 Tahun 1999)
- b. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Keppres Nomor 80 Tahun 2000)
- c. Komite Akreditasi Nasional (Keppres Nomor 78 Tahun 2001)
- d. Komite Penilaian Independen (Keppres Nomor 99 Tahun 2009)
- e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres Nomor 72 Tahun 2001)

- f. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Keppres Nomor 89 Tahun 1999)
- g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres Nomor 12 Tahun 2000)

4. Badan

Misalnya:

- a. Badan Pengawas Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007)
- b. Badan Narkotika Nasional (Keppres Nomor 17 Tahun 2002)
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007)
- d. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Keppres Nomor 150 Tahun 2002)
- e. Badan Koordinasi Pengembangan TKI (Keppres Nomor 29 Tahun 1999)
- f. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (Keppre Nomor 72 Tahun 1999)
- g. Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (Keppres Nomor 73 Tahun 1999)
- h. Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Prop. NAD dan Kep. Nias Sumatera Utara (Perpu Nomor 2 Tahun 2005)
- i. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23 Tahun 2004)
- j. Badan Pengatur Jalan Tol (PP Nomor 15 Tahun 2005)
- k. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP Nomor 16 Tahun 2005)
- l. Badan Pengelola Pusat Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Keppres Nomor 43 Tahun 1976)
- m. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (Keppres Nomor 85 Tahun 1999)

5. Lembaga

Misalnya:

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006)
- b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Keppres Nomor 8 Tahun 1999)
- c. Lembaga Sensor Film (PP Nomor 8 Tahun 1994)

6. Lembaga Pendidikan Negeri

Seluruh Lembaga Pendidikan Negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

7. Badan Hukum Milik Negara

Misalnya:

- a. Universitas Indonesia (PP Nomor 152 Tahun 2000)
- b. Universitas Gajah Mada (PP Nomor 153 Tahun 2000)
- c. Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 154 Tahun 2000)
- d. Institut Teknologi Bandung (PP Nomor 155 Tahun 2000)
- e. Universitas Sumatera utara (PP Nomor 56 Tahun 2003)

- f. Universitas Pendidikan Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2004)

8. Bentuk Lain

Misalnya:

- a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU Nomor 25 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 81 Tahun 2003)
- b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keppres Nomor 54 Tahun 2005)
- c. Konsil Kedokteran Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2004)
- d. Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008)
- e. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
- f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
- g. Dewan Pertimbangan Presiden
- h. Peradilan Pajak
- i. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

E. ORGANISASI NON-PEMERINTAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Misalnya:

- a. Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain.
- b. Yayasan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan RCTI Peduli, Dompot Dhuafa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
- c. Perkumpulan/Forum seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
- d. Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

F. PARTAI POLITIK DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

Misalnya:

- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Karya Peduli Bangsa
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
- Partai Peduli Rakyat Nasional
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Barisan Nasional
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Amanat Nasional
- Partai Perjuangan Indonesia Baru
- Partai Kedaulatan
- Partai Persatuan Daerah

- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Pemuda Indonesia
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- Partai Demokrasi Pembaruan
- Partai Karya Perjuangan
- Partai Matahari Bangsa
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- Partai Demokrasi Kebangsaan
- Partai Republika Nusantara
- Partai Pelopor
- Partai Golongan Karya
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Damai Sejahtera
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Bintang Reformasi
- Partai Patriot
- Partai Demokrat
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia
- Partai Indonesia Sejahtera
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama

G. BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH

Misalnya:

2. Perum Bulog
3. Perum DAMRI
4. Perum Jaminan Kredit Indonesia
5. Perum Jasa Tirta I
6. Perum Jasa Tirta II
7. Perum Pegadaian
8. Perum Percetakan Negara Indonesia
9. Perum Percetakan Uang RI
10. Perum Perhutani
11. PT Adhi Karya Tbk
12. PT Amarta Karya
13. PT Angkasa Pura I
14. PT Angkasa Pura II
15. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
16. PT Antam Tbk
17. PT Asuransi Ekspor Indonesia
18. PT Asuransi Jasa Indonesia
19. PT Asuransi Jasa Raharja
20. PT Asuransi Jiwasraya
21. PT Asuransi Kesehatan Indonesia

22. PT Bahtera Adhiguna
23. PT Bali Tourism Development Corp
24. PT Bank Ekspor Indonesia
25. PT Bank Mandiri Tbk
26. PT Bank Negara Indonesia Tbk
27. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
28. PT Bank Tabungan Negara
29. PT Barata Indonesia
30. PT Bhandha Ghara Reksa
31. PT Bio Farma
32. PT Biro Klasifikasi Indonesia
33. PT Boma Bisma Indra
34. PT Brantas Abipraya
35. PT Dahana
36. PT Danareksa
37. PT Dirgantara Indonesia
38. PT Djakarta Lloyd
39. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
40. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
41. PT Garam
42. PT Garuda Indonesia
43. PT Hotel Indonesia Natour
44. PT Hutama Karya
45. PT Indofarma Tbk
46. PT Indra Karya
47. PT Inhutani I
48. PT Inhutani III
49. PT Inti
50. PT Jamsostek
51. PT Jasa Marga
52. PT Kawasan Berikat Nusantara
53. PT Kawasan Industri Makassar
54. PT Kawasan Industri Wijayakusuma
55. PT Kereta Api Indonesia
56. PT Kertas Leces
57. PT Kimia Farma Tbk
58. PT Kliring Berjangka Indonesia
59. PT Krakatau Steel
60. PT LEN Industri
61. PT Merpati Nusantara Airlines
62. PT Nindya Karya
63. PT PANN Multi Finance
64. PT Pelabuhan Indonesia I
65. PT Pelabuhan Indonesia II
66. PT Pelabuhan Indonesia III
67. PT Pelabuhan Indonesia IV
68. PT Pelayaran Nasional Indonesia
69. PT Pembangunan Perumahan
70. PT Perkebunan Nusantara III

71. PT Perkebunan Nusantara IV
72. PT Perkebunan Nusantara IX
73. PT Perkebunan Nusantara V
74. PT Perkebunan Nusantara VI
75. PT Perkebunan Nusantara VII
76. PT Perkebunan Nusantara VIII
77. PT Perkebunan Nusantara X
78. PT Perkebunan Nusantara XI
79. PT Perkebunan Nusantara XII
80. PT Perkebunan Nusantara XIII
81. PT Perkebunan Nusantara XIV
82. PT Permodalan Nasional Madani
83. PT Pertamina
84. PT Pertani
85. PT Perusahaan Gas Negara Tbk
86. PT Perusahaan Listrik Negara
87. PT Perusahaan Pengelola Aset
88. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
89. PT PINDAD
90. PT Pos Indonesia
91. PT Pupuk Sriwidjaja
92. PT Rajawali Nusantara Indonesia
93. PT Reasuransi Umum Indonesia
94. PT Sang Hyang Seri
95. PT Sarinah
96. PT Semen Baturaja
97. PT Semen Gresik Tbk
98. PT Sucofindo
99. PT Surveyor Indonesia
100. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
101. PT Taspen
102. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
103. PT Timah Tbk
104. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
105. PT Waskita Karya
106. PT Wijaya Karya
107. Bank daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Bank Papua, dan bank daerah lainnya
108. Perusahaan Daerah Air Minum

H. Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Keterukaan Informasi Publik, tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.